

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR: KP. 457 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN
SIPIL BAGIAN 21-11 (*STAFF INSTRUCTION CASR PART 21-11*),
TENTANG PEMBERITAHUAN TERHADAP TIPE PESAWAT UDARA BARU
YANG DIDAFKAR DI INDONESIA DAN PENANGANAN TERHADAP
PEMBERITAHUAN DARI NEGARA LAIN DIMANA PESAWAT UDARA
TERDAFTAR (*NOTIFICATION OF NEW TYPE OF AIRCRAFT REGISTERED IN
INDONESIA AND HANDLING OF SUCH NOTIFICATION FROM OTHER STATE
OF REGISTRY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (*Civil Aviation Safety Regulations Part 21* tentang Prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-Bagiannya (*Certification Procedures For Product and Parts*) telah diatur mengenai pemberitahuan terhadap tipe pesawat udara baru yang didaftar di Inonesia dan penanganan pemberitahuan dari negara lain dimana pesawat udara didaftarkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21-11 (*Staff Instruction Part 21-11*), tentang Pemberitahuan Terhadap Tipe Pesawat Udara Baru Yang Didaftar Di Indonesia Dan Penanganan Terhadap Pemberitahuan Dari Negara Lain Dimana Pesawat Udara Terdaftar (*Notification Of New Type Of Aircraft Registered In Indonesia And Handling Of Such Notification From Other State Of Registry*), dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (*Civil Aviation Safety Regulations*) Part 21 tentang Prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-Bagiannya (*Certification Procedures For Product and Parts*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11/2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (*CASR*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/157/VII/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan (*Staff Instruction No. 39-01*) Tata Cara Pembuatan dan Penerbitan Perintah Kelaikan Udara;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/137/VI/2008 tentang Petunjuk Pelaksana (*Staf Instruction*) (*SI*) 43-01 tentang Pelaporan Adanya Kerusakan pada Pesawat Udara yang Sedang Dioperasikan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/138/VI/2008 tentang Petunjuk Pelaksana (*Staf Instruction*) (*SI*) 21-02 tentang Sertifikat Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara dan Persetujuan yang Berkaitan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN (*STAFF INSTRUCTION*) (SI) NOMOR 21-11 TENTANG PEMBERITAHUAN TERHADAP TIPE PESAWAT UDARA BARU YANG DIDAFTAR DI INDONESIA DAN PENANGANAN TERHADAP PEMBERITAHUAN DARI NEGARA LAIN DIMANA PESAWAT UDARA TERDAFTAR (*NOTIFICATION OF NEW TYPE OF AIRCRAFT REGISTERED IN INDONESIA AND HANDLING OF SUCH NOTIFICATION FROM OTHER STATE OF REGISTRY*).

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21-11 (*Staff Instruction Part 21-11*), tentang Pemberitahuan Terhadap Tipe Pesawat Udara Baru Yang Didaftar Di Indonesia Dan Penanganan Terhadap Pemberitahuan Dari Negara Lain Dimana Pesawat Udara Terdaftar (*Notification Of New Type Of Aircraft Registered In Indonesia And Handling Of Such Notification From Other State Of Registry*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 10 OKTOBER 2011

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDIJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP. 457 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 21-11 (STAFF INSTRUCTION
CASR PART 21-11), TENTANG PEMBERITAHUAN TERHADAP
TIPE PESAWAT UDARA BARU YANG DIDAFTAR DI
INDONESIA DAN PENANGANAN TERHADAP
PEMBERITAHUAN DARI NEGARA LAIN DIMANA PESAWAT
UDARA TERDAFTAR (NOTIFICATION OF NEW TYPE OF
AIRCRAFT REGISTERED IN INDONESIA AND HANDLING OF
SUCH NOTIFICATION FROM OTHER STATE OF REGISTRY)

Staff Instruction

SI 21 – 11

Notification of New Type of Aircraft Registered
In Indonesia and Handling of Such Notification
from Other State of Registry

Amendment : Original
Date :

REPUBLIC OF INDONESIA – MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION
JAKARTA - INDONESIA

FOREWORD

- 1. PURPOSE** : This Staff Instruction prescribes responsibilities, policies, and procedures to be used by the Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations for the notification of new type of aircraft registered in Indonesia and handling of such notification from other state of registry. This Staff Instruction may be made available to the public so that they may better understand the authority and responsibility of the DGCA

- 2. REFERENCES** : This Staff Instruction should be used in accordance with the applicable regulations.

- 3. CANCELLATIONS** : -

- 4. AMENDMENT** : The amendment of this Staff Instruction will be approved by the Director General of Civil Aviation.

TABLE OF CONTENTS

FOREWORD	ii
TABLE OF CONTENTS.....	iii
CHAPTER I - GENERAL.....	1
1. Definitions.....	1
2. References.....	2
3. Background.....	2
4. Policy	2
CHAPTER II - PROCEDURES.....	3
1. Notification to the State of design	3
2. Receiving Notification from State of Registry	3

CHAPTER I - GENERAL

1. Definitions

- a. State of Design. The State having jurisdiction over the organization responsible for the type design.
- b. State of Manufacture. The State having jurisdiction over the organization responsible for the final assembly of the aircraft.
- c. State of Registry. The State on whose register the aircraft is entered.

Note.- In the case of the registration of aircraft of an international operating agency on other than a national basis, the States constituting the agency are jointly and severally bound to assume the obligations which, under the Chicago Convention, attach to a State of Registry. See, in this regard, the Council Resolution of 14 December 1967 on Nationality and Registration of Aircraft Operated by International Operating Agencies which can be found in Policy and Guidance Material on the Economic Regulation of International Air

- d. Service Difficulty (SD).

A malfunction, defect, failure or occurrence experienced during operation or maintenance of an Indonesian registered aircraft or a leased aircraft operated by an Indonesian company or other entity that affects or could affect the airworthiness of the aircraft or safety of the flight crew, passenger, or ground personnel.

- e. Service Difficulty Report (SDR).

A mandatory notification submitted to the DGCA by an operator or approved aircraft maintenance organization (AMO) or manufacturer containing specific information about a Service Difficulty experienced or discovered.

- f. Mandatory Continuing Airworthiness Information

The term "mandatory continuing airworthiness information" is intended to include mandatory requirements for modifications, replacement of parts or inspection of aircraft, and amendment of operating limitations and procedures. Among such information is in the form of airworthiness directives.

2. References

- a. ICAO Annex 8
- b. CASR 21
- c. CASR 47
- d. SI 39-01
- e. SI 43-01
- f. SI 21-02

3. Background

- a. According to CASR 21.50 the holder of a design approval is required to maintain Instructions for Continued Airworthiness and to make those instructions available to any person required to comply with those instructions.
- b. In compliance with ICAO Annex 8 with respect to exchange of information with other contracting state related to the continued airworthiness aircraft.

4. Policy

Refer to the paragraph 2 above, Directorate General of Civil Aviation has set up policies as follow:

- a. DGCA will make a notification to the State of Design when a new type of aircraft was registered for the first time, into Indonesia's Civil Aircraft Register. This notification is necessary to ensure that support of Mandatory Continuing Airworthiness Information for the particular aircraft was provided by the State of Design.
- b. DGCA will follow up such notification from other State of Registry which registering Indonesia's Design Aircraft into their Civil Aircraft Registration. Base on this received notification, DGCA will support the State of Register with a Mandatory Continuing Airworthiness Information for the particular aircraft

CHAPTER II – PROCEDURES

1. Notification to the State of design

The Sub Directorate of Aeronautical Product (SDAP) is the office responsible for the notification to State of Design when a new type of aircraft was registered for the first time, into Indonesia's Civil Aircraft Register.

Prior to the issuance of Certificate of Registration (C of R), an evaluation should be made to verify if the aircraft is a new type of aircraft to be registered into Indonesia Civil Aircraft Registration for the first time. When such verification has been made, a letter of notification will be send to the State of Design.

The notification letter shall contain of a notification that a new type of aircraft has been registered and operated in Indonesia, an application to State of Design to support DGCA with Mandatory Continuing Airworthiness Information for the particular aircraft and a request of feedback information that the notification letter is received by the State of Design.

2. Receiving Notification from State of Registry

The Sub Directorate of Aeronautical Product (SDAP) is the office responsible to handle notification(s) received from a State of Registry that has entered an Indonesia's Design Aircraft into their Civil Aircraft Register.

When such notification letter from a State of Registry is received, SDAP will list the State Registry in the List of Federal Civil Aviation Authority (FCAA) Operating Indonesia Design Aircraft. The list will be used by Sub Directorate Engineering (SDE) to sent Mandatory Continuing Airworthiness Information in accordance with Staff Instruction SI 39-01 and notification of suspension or revocation of a Type Certificate for the particular Indonesia design aircraft type.

Note.

SDAP also list the State Registry in the List of FCAA Operating Indonesia Design Aircraft based on issuance of Export Certificate of Airworthiness in accordance with SI 21-02.

DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT